

## LAPORAN NOTULA

### *Rapat Pendalaman Usulan ICW dan TI Indonesia – Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Senin, 15 September 2022 – Pukul: 10.00 – 12.00

#### PENDAHULUAN

Indonesia Corruption Watch bersama dengan Transparency International Indonesia mengusulkan rencana aksi dengan judul komitmen Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sasaran di dalam proposal usulan rencana aksi mencakup delapan poin ukuran keberhasilan yang bervariasi dari lingkup pengawasan, pengembangan sistem, dan transparansi pengadaan darurat.

#### TUJUAN

Rapat pendalaman usulan mendorong keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan paparan usulan rencana aksi yang diusulkan oleh ICW dan TI Indonesia dalam lingkup Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

#### PEMBAHASAN

1. **Armita** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
  - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
  - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitas pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
  - Telah terdapat 6 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 saat ini dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus isu dengan banyak poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis yakni: 1) anti korupsi dan anggaran; 2) ruang kewargaan dan demokrasi; 3) pelayanan publik yang inklusif; 4) akses keadilan; 5) Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI); 6) Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
  - Di dalam usulan rencana aksi ini ada delapan ukuran keberhasilan dengan K/L sasaran yang menjadi penanggung jawab antara lain LKPP, Kemendagri, Kemenkumham, dan Komisi Informasi Pusat dan Provinsi;
2. **Ibu Tari Rachman** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
  - Judul di proposal telah disesuaikan dengan melihat keberlanjutan dari RAN OGI ke-VI, dengan merincikan target yang ingin disasar dalam lingkup transparansi dan partisipasi dalam PBJ;
  - Ukuran keberhasilan dalam usulan rencana aksi mencakup 8 hal antara lain yakni: Pertama, publikasi transaksi K/L/Pemda di e-katalog. E-katalog merupakan pilihan utama dalam proses belanja barang dan jasa dimana tender

menjadi pilihan terakhir;

- Kedua, informasi mengenai pengadaan darurat untuk dapat lebih jelas dan lebih banyak K/L/Pemda. Pada renaksi sebelumnya diusulkan ada dashboard khusus di LPSE ada informasi pengadaan darurat di K/L/Pemda karena sampai dengan tahun lalu pemerintah tidak pernah punya informasi pengadaan darurat yang sudah dilakukan untuk apa saja. Pada Renaksi VI, LKPP telah menambahkan fitur pengadaan darurat yang tetap membutuhkan kerja sama dengan K/L/Pemda untuk pengisiannya karena biasanya pengadaan darurat dilakukan secara manual. Kanal PBJ Darurat didorong untuk minimal mencakup pemenang berkontrak, spesifikasi barang yang dibeli, berapa jumlah, dan sumber dananya. Selain itu akan dilakukan pula review terhadap Perlem terkait PBJ Darurat, serta hendak pula mendorong Kemendagri mengeluarkan SE yang meminta seluruh Pemda untuk dapat melengkapi informasi PBJ Daruratnya;
  - Ketiga, mendorong efektivitas kanal complaint handling mechanism pengadaan (e-pengaduan) dalam menangani pengaduan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan API terbuka, integrasi e-pengaduan ke opentender.net, dan mengintegrasikan inspektorat K/L/Pemda dalam sistem e-pengaduan;
  - Keempat, mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka, termasuk data BO dan data rekaman kinerja/performa penyedia;
  - Kelima, mendorong pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan melakukan pelatihan bagi UMKM mengenai peluangnya dalam PBJ (hal ini diamanatkan oleh Perpres PBJ, LKPP juga memberi masukan untuk bisa melibatkan bagian pelatihan di LKPP), melakukan audit sosial mengenai kemudahan UMKM untuk terlibat dalam PBJ pemerintah (ICW akan meminta LKPP untuk memberikan input apa saja dimensi yang harus dilihat);
  - Keenam, mendorong pengawasan barang dan jasa oleh publik dengan mengadakan training PBJ untuk CSO dan jurnalis, menyusun modul audit sosial PBJ bagi CSO, dan menyusun modul akademi anti-korupsi mengenai pengawasan PBJ (modul akademi antikorupsi merupakan bahan yang memang dikerjakan oleh ICW);
  - Ketujuh, mendorong sistem pengadaan elektronik yang mengakomodir keterbukaan informasi di pengadaan sesuai Perkislip 1/2021 untuk menyediakan dokumen/informasi yang dapat diakses oleh publik (perlu diskusi lebih lanjut dengan LKPP data mana yang sebaiknya disediakan). Keharusan UMKM ikut andil di dalam PBJ ada di tingkat perencanaan saja sedangkan data penyedia yang menang adalah UMKM itu belum tersedia;
  - Kedelapan, memastikan implementasi Perkislip 1/2021 dengan melakukan uji akses keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan memasukan poin keterbukaan PBJ dalam monev keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh KIP.
3. **Bapak Agus Sarwono** dari perwakilan TI Indonesia menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Tidak semua K/L melakukan pencatatan PBJ darurat dan yang perlu ditekankan ialah PBJ darurat tidak selalu berkaitan dengan pengadaan yang berkaitan dengan covid-19 saja;

- Sudah ada peraturan lembaga terkait PBJ darurat tetapi informasinya masih sangat minim, maka usulan review perlem darurat diusulkan untuk dilakukan
4. **Bapak Kes Tuturong** selaku perwakilan dari ICW menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Berdasarkan diskusi dengan LKPP, LKPP memiliki rencana yang sudah sejalan dengan usulan-usulan ini tetapi ada kendala di pengembangan sistem dan anggaran. Telah didiskusikan untuk adanya opsi pengembangan bersama antara LKPP dan masyarakat sipil tidak dalam keseluruhan sistem tetapi beberapa bagiannya yang bisa dikembangkan bersama;
5. **Bapak Graha** selaku perwakilan dari Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Terkait anggaran dari tahun ke tahun walaupun penyerapannya bagus akan tetapi tidak meningkat, kecuali di tahun 2023 dimana untuk tahun 2023 ada arahan dari Menteri Bappenas untuk menaikkan anggaran untuk LKPP.
  - Dari penguatan sistem memang ada isu dalam hal anggaran, di dalam 2023 Dit. SPPEPP mendorong LKPP yang bisa mengintegrasikan sistem informasi yang terpecah-pecah untuk menjadi satu, Dit.SPPEPP melihat antara satu sistem dengan yang lain bisa jadi tidak in line;
  - Terkait ukuran keberhasilan 1 mengenai publikasi e-katalog, pemerintah sedang menggalakan untuk seluruh transaksi sesuai inpres 2/2022 akan didorong percepatan belanja produk dalam negeri. Dari sisi perencanaan pengadaan sampai serah terima dan pembayaran yang akan disampaikan oleh K/L, apa yang akan dipublikasikan harus berkoordinasi lebih lanjut dengan LKPP. Dit. SPPEPP juga mendorong untuk *e-catalog* karena adanya dukungan untuk prioritas nasional dimana pemerintah mendorong untuk belanja produk yang terkait TKDN;
  - Terkait informasi pengadaan darurat, Perlem PBJ Darurat tidak terlalu menjadi prioritas dan belum membahas lebih detail dengan LKPP sejauh mana informasi yang terkait dengan kedaruratan
  - LKPP berkoordinasi dengan Kemendagri untuk bisa manage katalog lokal, sehingga kemendagri mengeluarkan surat telegram dan seharusnya dengan konsep yang sama seharusnya bisa diaplikasikan di e-katalog
  - Poin ketiga terkait mendorong efektivitas kanal complaint handling juga belum begitu didalami oleh Dit.SPPEPP harus didalami o
  - Poin kelima terkait pelibatan UMKM sejalan dengan rencana kerja LKPP dimana di tahun 2023 didorong keterlibatan UMKM untuk onboarding di e-katalog dan ini sudah menjadi parameter kinerja yang akan diukur (berapa banyak UMKM yang mengikuti pelatihan dan yang terlibat di dalam PBJ), terkait audit sosial untuk UMKM belum begitu didalami;
  - Concern yang didorong di tahun 2022 sampai dengan 2024 di LKPP berkaitan dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pelibatan UMKM dalam PBJ;
  - Poin keenam, pengawasan pengadaan barang dan jasa untuk publik memang belum tetapi sudah ada mendorong untuk pelatihan di jabatan fungsional dalam lingkup LKPP;
  - Poin ketujuh dan kedelapan belum pernah didiskusikan dengan LKPP;
6. **Sesi tanya jawab** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
- (Ibu Tari - ICW) Pertemuan terakhir yang dilakukan dengan LKPP belum mendapat informasi mengenai integrasi aplikasi di LKPP yang berbeda-beda sistem. ICW dan TI akan memetakan kegiatan mana saja yang bisa didanai dan LKPP akan melihat kegiatan mana yang akan menjadi kegiatan dan sudah dianggarkan di LKPP untuk mengetahui ketersediaan anggaran. Di dalam usulan renaksi belum begitu jelas juga peran LKPP untuk setiap poin ukuran keberhasilan, di pertemuan selanjutnya LKPP dan CSO akan membahas hal tersebut lebih lanjut;
  - (Bapak Darwanto – MediaLink) perlu komunikasi lebih lanjut dengan komisi

informasi, Kemendagri, Kemenkumham. Modalitas yang dimiliki setiap K/L apa memang harus dipetakan;

- (Bapak Kes Tuturo'ong – ICW) Untuk mendorong keterbukaan informasi dalam level K/L perlu keterlibatan KSP sebagai stakeholders dalam renaksi. Telah menjadi pertimbangan untuk memasukkan poin TKDN dan PDN karena menjadi pertanyaan juga apakah hal ini menjadi salah satu yang didorong oleh OGP atau tidak;
- (Ibu Tari – ICW) sudah pernah mengaddress kemendagri untuk mendorong keterbukaan informasi di tingkat daerah, apakah ada lembaga di level K/L yang bisa mendorong keterbukaan informasi di level K/L;
- (Bapak Darwanto) untuk mengikat agar lebih patuh di level daerah Kemendagri bisa mengeluarkan surat edaran, apakah di level K/L perlu ada MoU dengan setiap K/L agar kegiatan tersebut mengikat
- (Theo – OGI) Pemetaan ke KSP sedikit kurang tepat, karena kemampuan untuk mendorong kepatuhan di K/L bisa jadi tidak memungkinkan. Dalam praktik LKPP apakah yang digunakan adalah bentuk MoU atau bagaimana
- (Bapak Graha – Dit.SPPEPP) Direktorat sektor Bappenas berfokus menjaga target prioritas nasional, berfokus di sisi perencanaannya dan jarang berfokus di sisi belanja pengadaan. Agar ada suatu kepatuhan yang rigid memang harus ada perintah dari sesuatu yang lebih tinggi misalnya Inpres. Dalam praktik, LKPP dengan beberapa kementerian melakukan MoU tetapi memang tidak memiliki keterikatan spesifik yang tegas jika bentuknya MoU;
- (Bapak Darwanto) transparansi di DIPA dan RKA K/L dipilih kemendikbud, kemenkes, dan kementu. Jika memang sulit untuk semua K/L paling tidak jika memungkinkan bisa mengambil beberapa K/L untuk *dipilotkan* yang kemudian bisa menjadi benchmark untuk K/L lainnya;
- (Bapak Agus – TI Indonesia) callnya memang dirasa terlalu tinggi tetapi levelnya bisa diturunkan, apabila disepakati untuk *piloting* di dua K/L maka perlu assesment K/L mana yang paling banyak mengadakan pengadaan di masa pandemi;
- Apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan *piloting* K/L setelah adanya *assessment* maka akan didorong adanya kajian terkait kajian pengadaan darurat yang perlu dibuka kepada publik yang menyertakan dampak dan manfaatnya bagi publik juga seperti apa.

## **KESIMPULAN**

Usulan rencana aksi mengenai transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diusulkan oleh ICW dan TI beberapa poin ukuran keberhasilannya memang sudah menjadi masuk menjadi rencana kerja yang dilakukan oleh K/L terkait mitra Dit.SPPEPP yang dalam hal ini adalah LKPP. Akan tetapi, perlu pemetaan dan diskusi lebih lanjut mengenai usulan rencana aksi untuk sejauh mana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L dan juga CSO.

# DOKUMENTASI

